

33 Gubernur Bawa Tanah dan Air ke IKN sebagai Simbol Keberagaman

JAKARTA (IM) – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, 33 gubernur akan membawa tanah dan air ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kemudian, tanah dan air tersebut akan disatukan ke dalam sebuah kendi sebagai lambang keberagaman.

“Dari Bengkulu, dari Papua Barat, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera Barat, Aceh, semua berkumpul di sana,” kata Mahfud dalam keterangannya, Minggu (13/3).

Dia mengajak masyarakat untuk menjaga Tanah Air Indonesia karena terdapat keberagaman di dalamnya. Menurutnya, 2 Kilogram tanah dan satu liter air yang akan dibawa oleh masing-masing gubernur telah mewakili seluruh suku dan agama di masing-masing provinsi.

“Inilah tanah, air kita. Indonesia, Tanah Air. Maka kita harus jaga Tanah Air

kita. Simbolik apa yang muncul dari itu? Keberagaman,” ujarnya.

Selain itu, dalam 30 tahun ke depan hal yang dilakukan ini akan menjadi cerita yang amat menarik.

“Bagaimana kita beracara melalui adat kenegaraan dan keagamaan, digabung di situ, untuk masuk ke ibu kota baru,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkunjung ke IKN Nusantara selama tiga hari mulai dari 13 hingga 15 Maret 2022. Presiden akan berkemah di titik nol yang menjadi lokasi dibangunnya Istana Negara.

Pada Senin 14 Maret 2022, Tanah dan Air yang dibawa para gubernur akan digunakan dalam ritual adat dengan menuangkannya ke dalam Kendi Nusantara. Wadah besar tersebut terbuat dari tembaga. ● han

Kemenlu RI Pastikan 9 WNI di Chernihiv dalam Kondisi Aman

JAKARTA (IM) - Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) mengatakan, serangan Rusia di Chernihiv, Ukraina sempat mengganggu layanan umum seperti air, listrik, gas, hingga jaringan komunikasi. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, akibat serangan tersebut, komunikasi dengan sembilan WNI di Chernihiv sempat terputus. Namun demikian, gangguan tersebut telah berhasil diperbaiki dan komunikasi dengan sembilan WNI kembali bisa terhubung.

“Komunikasi dengan sembilan WNI yang sempat terputus karena gangguan komunikasi seluler, saat ini sudah bisa terhubung kembali. Mereka dalam kondisi aman dan sehat di safe house,” kata Judha kepada wartawan, Minggu (13/3).

Akibat serangan tentara Rusia di Chernihiv telah menghancurkan sejumlah infrastruktur. Serangan Rusia pun telah menargetkan infrastruktur sipil yang bukan merupakan lokasi militer.

Judha mengatakan, saat ini 9 WNI masih berlindung di pabrik plastik tempat mereka bekerja. “Fasilitas listrik, air dan gas tetap beroperasi, persediaan logistik masih memadai,” kata Judha.

Pihaknya mengaku masih terus berupaya untuk melakukan evakuasi. KBRI Kyiv dan Tim Perlindungan WNI beberapa kali telah melakukan upaya evakuasi namun usaha tersebut harus ditunda.

“Karena situasi pertempuran di jalur evakuasi. Kedua pihak yang berperang perlu membentuk humanitarian corridor yang benar-benar dipatuhi dan efektif di lapangan,” tandas Judha. ● mei



FOTO: ANT

TARGET KONSUMSI IKAN NASIONAL 2022

Buruh angkut mengotong ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Beba, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu (13/3). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan angka konsumsi ikan nasional 2022 sebanyak 59,33 kilogram per kapita setara ikan utuh segar, lebih tinggi 7,1 persen dari capaian 2021 sebanyak 55,37 kilogram per kapita.

Karakter PAN Bukan Oposisi, Wajar Berharap Ada Reshuffle

JAKARTA (IM) - Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro, menilai sikap Partai Amanat Nasional (PAN) tidak memiliki karakter sangat kuat sebagai partai di luar kekuasaan atau oposisi. Jadi wajar jika partai yang kini dipimpin Zulkifli Hasan berharap ada reshuffle kabinet.

Menurut Bawono, sejak dulu PAN selalu masuk sebagai partai politik koalisi pendukung pemerintah meskipun seringkali menyusul belakangan. Maka dari itu, lanjut dia, sebagai partai pendukung pemerintah PAN berharap bisa memperoleh posisi di kabinet.

“Jadi ini memang ada dorongan politik kuat agar presiden segera melakukan reshuffle untuk juga mengakomodasi PAN,” ujar Bawono kepada wartawan, Minggu (13/3).

Seperti diketahui, PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakeras) II PAN pada 31 Agustus 2021 lalu. Namun, sampai saat ini, PAN tidak kunjung mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju. Wacana tentang masuknya PAN ke dalam kabinet pertama kali disampaikan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim.

Luqman mengatakan, jika reshuffle terjadi pada akhir Maret 2022, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri plus wakil menteri. Isu itu semakin kuat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo Jokowi beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, ketika dikonfirmasi Zulkifli membantah membahas soal reshuffle dengan Jokowi. Menurut Wakil Ketua MPR itu, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Zulkifli mengatakan PAN tidak ikut campur dalam persoalan wacana reshuffle kabinet. Politikus PAN Bima Arya Sugiarto justru membenarkan partainya bakal mendapatkan jatah satu kursi menteri dan wakil menteri jika wacana reshuffle kabinet terwujud.

“Informasinya begitu (PAN dapat kursi menteri dan wakil menteri),” kata Bima melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (11/3) lalu. Soal penunjukan siapa kader partai yang bakal diajukan menjadi menteri atau wakil menteri jika terjadi reshuffle, Bima mengatakan kalangan internal PAN sepakat menyerahkan urusan itu kepada Zulkifli.

Bima mengatakan, PAN mempunyai sejumlah kader yang dinilai mempunyai kemampuan yang baik untuk mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Baru. Selain itu, dia mengatakan partainya juga sudah siap jika memang wacana reshuffle terwujud. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANT



LOMBA MENEMBAK PIALA DANPASPAMPRES 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) berjabat tangan tos dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) usai mengikuti Lomba Menembak Piala Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) 2022 dalam kelas ‘Duelling Plate’ di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Minggu (13/3). Kejuaraan menembak yang merupakan rangkaian Hari Bakti ke-76 Paspampres tersebut diikuti sekitar 800 peserta dari TNI/Polri dan sipil.

Wacana Penundaan Pemilu yang Diklaim Gunakan Analisis Big Data Dipertanyakan

Analisis Big Data yang disebut sebagai acuan untuk mendorong penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa tugas presiden, dipertanyakan. Pasalnya, hasil sejumlah survei justru masyarakat menolak gagasan itu.

JAKARTA (IM) – Argumen beberapa pejabat dan elite partai politik yang menganggarkan wacana penundaan pemilu dengan secara gamblang mengklaim atas dasar analisis big data bahwa rakyat menginginkan hal tersebut, patut dipertanyakan.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivistis (PENA) 98, Adian Napitupulu, yang mempertanyakan analisis big

data yang digaungkan sejumlah pejabat dan politisi untuk mendukung argument mereka bahwa rakyat Indonesia menginginkan Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan Presiden diperpanjang.

Dia mempertanyakan siapa pihak yang sebenarnya menginginkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

“Sebenarnya perpanjangan masa jabatan presiden itu

merupakan kehendak rakyat atau bukan? Bagaimana untuk mengetahuinya? Apakah melalui partai politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui survei atau analisis big data? Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan,” kata Adian dalam keterangannya, Sabtu (12/3).

Politisi PDI-P itu melihat, apabila kehendak rakyat diukur dari suara partai berdasarkan kursi perwakilan di parlemen melalui seluruh struktur partai, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden untuk disetujui.

Pasalnya, dia mengatakan bahwa partai yang menolak wacana justru menguasai mayoritas kursi parlemen dengan total 388 kursi, sedangkan yang

setuju hanya 187. Sebaliknya, jika kehendak rakyat diukur melalui hasil survei, Adian menggunakan hasil survei LSI Denny JA yang menyebut bahwa 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Hanya 20,3 persen masyarakat setuju dengan wacana tersebut.

“Kalau menurut Muhaimin (Ketua Umum PKB), dan Luhut Binsar Panjaitan (Menko Maritim dan Investasi), berdasarkan Big Data, maka disimpulkan bahwa 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden, dan 40 persen sisanya menolak,” ungkap Adian.

Melihat berbanding terbalik hasil antara hasil survei dan analisis big data, Adian pun kembali mempertanyakan argumentasi sejumlah elite partai politik dan pejabat pemerintah yang menyuarakan wacana penundaan pemilu. Ia mempertanyakan mana alat ukur yang perlu dipercaya terkait kehendak rakyat dalam wacana penundaan pemilu.

“Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena presentase survei dipaparkan secara lengkap oleh lembaga independen, sementara hasil big data dipaparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak independen dan pasti juga sarat kepentingan politik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Adian menilai hasil sejumlah lembaga survei nasional justru memaparkan data yang lengkap dari responden atau masyarakat. Sementara, paparan big data dinilai hanya disampaikan dalam pernyataan politisi atau

pejabat tanpa publikasi resmi yang detail.

“Di semua media, hanya disebutkan data dari 100 juta pengguna sosial media dan 60 persen mendukung, 40 persen menolak. Sama sekali tidak disebutkan data tersebut dari big data berasal Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau apa?,” tanya Adian.

Selain itu, Adian berbanding tidak ada paparan yang secara ilmiah dalam big data menjelaskan beberapa tolak ukur untuk menyimpulkan bahwa masyarakat menginginkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

“Metodologinya bagaimana, angka 100 juta itu dari mana saja dan rentang waktunya berapa lama. Jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah hingga margin error termasuk lembaga mana yang mengelola big data tersebut. Apakah lembaga Independen, BIN, BRIN, Menkominfo, Badan Siber atau apa sebagaimana paparan hasil survei yang lengkap dan detail,” tutur Adian.

Sebelumnya, wacana penundaan tidak ada berujung pada wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir. Analisis big data pun digunakan elite politik dan pejabat yang mendukung adanya wacana penundaan pemilu. Salah satunya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya dikabarakan menggunakan analisis big data untuk memaparkan bahwa rakyat menginginkan penundaan pemilu. ● mei

Anggota DPR Sebut Tak Ada yang Salah pada Logo Baru Produk Halal Indonesia

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menegaskan, setiap orang memiliki interpretasi sendiri terhadap logo baru produk halal Indonesia sebagai pengganti produk halal MUI. Setiap orang punya penilaian sendiri tergantung dari sudut mana ia melihat.

“Soal logo tersebut diinterpretasi atau dimaknai secara berbeda-beda tentu tergantung dari sudut pandang masing-masing yang menilainya,” kata Ace kepada wartawan, Minggu (13/3).

Namun menurut Ace, tidak ada yang salah dengan logo baru halal tersebut. Menurut

nya, makna halal sudah terkandung dalam logo itu. Dia menilai tulisan itu tidak akan asing bagi mereka yang memahami jenis-jenis tulisan Arab.

“Bagi saya, yang terpenting tulisan Arab itu yang mengandung kata ‘halal’ dan sudah terkandung dalam tulisan Arab yang bermakna itu. Sepengalaman saya jenis tulisan itu dalam kaligrafi Arab termasuk dalam kategori khat kufi,”

ujarnya.

“Bagi orang yang terbiasa membaca huruf Arab dengan berbagai jenisnya, tentu akan mudah untuk membacanya bahwa itu huruf Arab yang artinya halal. Tapi bagi yang tak terbiasa membaca Arab, pasti masih teramat asing. Oleh karena itu, perlu disosialisasikan kepada masyarakat lebih luas soal logo tersebut,” ujarnya.

Terkait adanya anggapan Jawa sentris karena bentuk logo seperti wayang, Ace tidak mempermasalahkannya. Dia menganggap bentuk logo baru seperti itu mengadaptasi kearifan lokal.

“Soal memaknainya yang tergantung cara kita memandangnya. Yang jelas bahwa pembuat logo ini memiliki tujuan huruf Arab halal ini mengadaptasi kearifan lokal yang dimiliki budaya bangsa kita,” ujarnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemag) telah menetapkan label halal baru yang berlaku secara

nasional. Ada filosofi tertentu di balik desain label halal yang baru ini.

Adapun terkait filosofi desain halal yang baru ini, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Ibrahim menjelaskan desain ini mengadaptasi nilai-nilai keindonesian. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik berkarakter kuat dan merepresentasikan Halal Indonesia.

“Bentuk Label Halal Indonesia terdiri atas dua objek, yaitu bentuk Gunung dan motif Surjan atau Lurik Gunung pada wayang kulit yang berbentuk limas, lancip ke atas. Ini melambangkan kehidupan manusia,” kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Ibrahim dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/3).

“Bentuk gunung itu tersusun sedemikian rupa berupa kaligrafi huruf Arab yang terdiri atas huruf ha, lam alif, dan lam, dalam satu rangkaian sehingga membentuk kata ‘Halal,’” katanya. ● han



FOTO: ANT

PERALIHAN PANDEMI MENUJU ENDEMI

Warga berolahraga di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (13/3). Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Reisa Broto Asmoro mengungkapkan peralihan pandemi menuju endemi tidak bisa lepas dari dua hal, yaitu jumlah kasus harian dan angka kematian yang rendah, serta tingkat keterisian rumah sakit.

Soal Tudingan Bagi-bagi Kavling di IKN, KSP Persilahkan KPK Tindak Lanjuti

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengungkap terdapat dugaan bagi-bagi kavling di lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, bila memang terdapat temuan KPK dan dianggap terjadi tindak pidana korupsi, KPK bisa mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan kewenangannya.

“Kalau ada temuan KPK dan dianggap terjadi tindak pidana korupsi, tentu KPK bisa melakukan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah hukum yang menjadi kewenangannya,” kata Wandy kepada wartawan, Minggu (13/3).

Ia pun menjelaskan, berdasarkan data terkini, kepemilikan tanah di seluruh kawasan IKN sebesar 80 persen adalah milik negara. Jumlah kepemilikan lahan milik negara pada kawasan IKN tersebut meliputi 199.962 hektar lahan kawasan pengembangan baik untuk kawasan hutan dan non-hutan.

Adapun dalam proses pengambil-alihan keseluruhan kawasan akan menjadi tanggung jawab Otorita IKN. “Proses pengambil-alihan keseluruhan nanti akan men-

jadi tanggung jawab Otorita IKN yang akan dibantu oleh kementerian teknis, terutama Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan tentunya PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang akan melakukan pembangunan fisik di tahap awal,” jelas Wandy.

Sebelumnya, dugaan bagi-bagi kavling di IKN mulanya diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwatan. Ia mengatakan, KPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah IKN yang dilakukan dengan menggunakan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).

Sebab, ia mendapat informasi tidak semua lahan di IKN clean and clear.

“Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. IKN juga menjadi prioritas kami,” kata Alex, Jumat (11/3) lalu.

“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clear. Dari informan kami, sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” katanya. ● han